

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjabarkan terkait kewenangan yang dimiliki BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara. Dualisme institusi dalam menentukan kerugian keuangan negara menghasilkan kekuasaan yang tumpang tindih yang berdampak pada kredibilitas institusi ini. Hal ini tentu mempengaruhi praktek di lapangan, salah satunya kepastian hukum yang tidak terjamin dalam menerapkan penegakan hukum, sangat memungkinkan bahwa setiap lembaga yang menghitung kerugian yang ditimbulkan negara menggunakan teknik penghitungan tidak sama, dan pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda sehingga dapat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani tuduhan korupsi. Metode hukum normatif digunakan penulis dalam riset ini, melalui dua macam pendekatan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPK selaku lembaga bersifat independen untuk mengukur dan menentukan kerugian negara baik yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum, sementara kewenangan BPKP sebagai institusi yang berada di bawah presiden yang bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara pemerintah dalam arti eksekutif sudah baik, sehingga majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi menggunakan perhitungan dari Lembaga nasional yaitu BPK yang diberikan amanat dari UUD NRI 1945.

Kata Kunci : Wewenang, BPK, Kerugian Keuangan Negaras

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the authority possessed by the BPK in determining state financial losses so that the panel of judges handling cases can use calculations from institutions that have been mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in determining state financial losses in order to achieve legal certainty. Institutional dualism in determining state financial losses results in overlapping powers that impact the credibility of these institutions. This certainly affects practice in the field, one of which is legal certainty that is not guaranteed in implementing law enforcement against corruption, it is very possible that each institution that calculates losses incurred by the state uses different calculation techniques, and in the end, the reports provided are also different. so that it can affect the performance of law enforcement agencies in handling allegations of corruption. The normative legal method is used by the author in this research, through two kinds of approaches, namely statutory and conceptual. The results of the study show that the authority of the BPK as an independent institution is to measure and determine state losses whether committed by a person or a legal entity, while the authority of the BPKP as an institution under the president's duty is to ensure that the government's state financial management in the executive sense is good. so that the panel of judges handling corruption uses calculations from a national institution, namely the BPK, which was given a mandate from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword : Authority, BPK, State Financial Losses